

**PERAN KOMUNIKASI PEMERINTAH DINAS KETENAGAKERJAAN DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM PENYERAPAN TENAGA
KERJA LOKAL DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS LIKUPANG**

Oleh

FEBRIOLASARI TURANG

Julius L. K. Randang

Nicolas Mandey

Email: sarryrosia@gmail.com

RINGKASAN

Kawasan Ekonomi Khusus adalah suatu kawasan yang secara geografis dan yurisdiktif merupakan Kawasan perdagangan bebas. Sulawesi Utara merupakan salah satu dari provinsi di Indonesia yang memiliki KEK. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan nantinya untuk KEK Likupang ini sekitar 70.000an. Namun kenyataan yang ada pemerintah setempat lebih banyak mengadopsi tenaga kerja dari luar. Oleh karena itu penelitian ini membahas tentang peran pemerintah dalam penyerapan tenaga kerja lokal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan memanfaatkan informan yaitu pemerintah disnakertrans sulut sebagai sumber data penelitian dengan menggunakan landasan teori kredibilitas sumber dari Hovland yang dimana pemerintah merupakan sumber yang kredibel sehingga dapat mempersuasi para tenaga kerja lokal. Dari penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan antara lain: 1) Pemerintah dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebagai sumber informasi memiliki keahlian dalam mempersuasi para tenaga kerja lokal. Hal ini di dukung dengan tidak adanya kesulitan dalam berkomunikasi dan mampu mempengaruhi audience dalam setiap kegiatan komunikasinya terkait dengan ketenagakerjaan. 2) Pemerintah dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebagai sumber informasi merupakan sumber yang dipercaya dalam memberikan informasi menyangkut masalah ketenagakerjaan. Hal ini didukung dengan penguasaan akan peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan ketenagakerjaan. 3) Pemerintah dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebagai sumber informasi sangat berperan dalam memfasilitasi penyerapan tenaga kerja khususnya tenaga kerja lokal di kawasan ekonomi khusus

dengan memberikan informasi-informasi baik menggunakan media massa maupun media komunikasi antar pribadi.

Kata Kunci: Peran, Komunikasi Pemerintah, Penyerapan, Tenaga Kerja Lokal, Kawasan Ekonomi Khusus

***THE COMMUNICATION ROLE OF NORTH SULAWESI GOVERNMENT
DEPARTMENT OF MANPOWER AND TRANSMIGRATION IN TH ABSORPTION OF
LOCAL LABOR ON SPECIAL ECONOMIC ZONE AT LIKUPANG***

By:

FEBRIOLASARI TURANG

Julius L. K. Randang

Nicolas Mandey

Email: sarryrosia@gmail.com

SUMMARY

Special Economic Zone is an area that is geographically and jurisdictionally a free trade. North Sulawesi is one of province in Indonesia that owns SEZ. The number of labor that Likupang's SEZ need is about 70.000. But in reality, the government more adopt the labor from outside. That's why this research is discuss about the role of government in the absorption of local labor. This research using qualitative research methods with informants which is North Sulawesi goverments departement of manpower and transmigration as sources with a theoretical basis is source credibility by Hovland which is government as a credible source so they can persuade the local labor. From this study produced several conclusions including: 1) The Government of the Department of Manpower and Transmigration as a source of information has expertise in persuading the local workforce. This is supported by the absence of difficulties in communicating and being able to influence the audience in any communication related to manpower activities. 2) The Government of the Department of Manpower and Transmigration as a source of information is a trusted source in providing information regarding labor issues. This is supported by the



mastery of regulations and legislation related to employment. 3) The Government of the Department of Manpower and Transmigration as a source of information has a very important role in facilitating employment, especially local workers in special economic zones by providing information both using mass media and interpersonal communicatio media.

Keywords: Role, Government Communication, Absorption, Local Labor, Special Economic Zones.

Keyword: Social Media, Facebook, Manguni Tetengkoren, Hoax.

1. PENDAHULUAN

Saat ini pemerintah sedang melaksanakan berbagai macam program pembangunan, baik itu pembangunan di bidang sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Pembangunan yang cukup mendapat perhatian masyarakat yaitu pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang tersebar di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau *Special Economic Zone* (SEZ) adalah wilayah geografis yang memiliki peraturan ekonomi khusus yang lebih liberal dari peraturan ekonomi yang berlaku di suatu negara. Kawasan Ekonomi Khusus itu sendiri adalah suatu kawasan yang secara geografis dan yurisdiktif merupakan Kawasan perdagangan bebas. Sasaran penerapan KEK adalah untuk meningkatkan investasi asing di suatu negara dengan menyediakan berbagai insentif. KEK dibentuk untuk membuat lingkungan

kondusif bagi aktivitas investasi, ekspor, dan perdagangan guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi serta sebagai katalis reformasi ekonomi. Ide ini diinspirasi dari keberhasilan beberapa negara yang lebih dulu mengadopsinya, seperti Tiongkok dan India. Bahkan data-data empiris melukiskan bahwa KEK di negara-negara tersebut mampu menarik para investor, terutama investor asing untuk berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja.

Salah satu keuntungan dari KEK adalah Membuka Lapangan Pekerjaan, Karena kawasan ekonomi khusus mendapatkan investasi dalam jumlah yang sangat besar, kawasan tersebut juga umumnya mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat dicirikan dengan munculnya banyak perusahaan serta pabrik baru yang mencoba peruntungannya. Banyak perusahaan baru yang langsung tumbang karena kurang berpengalaman

atau kurang modal, namun tidak sedikit pula yang sukses. Berdirinya perusahaan-perusahaan serta pabrik-pabrik baru pada kawasan ekonomi khusus merupakan hal yang baik bagi para pengangguran. Pabrik-pabrik tersebut memerlukan pekerja agar dapat beroperasi. Oleh karena itu, pertumbuhan kawasan ekonomi khusus dapat menurunkan pengangguran serta meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan. Iqbal Hakim insanpelajar.com 'keuntungan dan kerugian Kawasan Ekonomi Khusus'

Sulawesi Utara merupakan salah satu dari provinsi-provinsi di Indonesia yang memiliki Kawasan Ekonomi Khusus, di dua lokasi yang berbeda yaitu Kabupaten Minahasa Utara dan Kota madya Bitung. Untuk Kabupaten Minahasa Utara ditetapkan sebagai KEK Pariwisata yang lokasinya di Likupang sementara untuk KEK *industry* yang dibangun di Kota Bitung.

Pembangunan KEK maka sangat

dibutuhkan tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan nantinya untuk Kawasan Ekonomi Khusus Likupang ini sekitar 70.000an. Oleh karena itu peran pemerintah sangat penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar memiliki kesiapan untuk menyambut era globalisasi.

Kenyataan yang ada pemerintah setempat lebih banyak mengadopsi tenaga kerja dari luar. Sedangkan tingkat pengangguran yang ada di Sulawesi Utara masih tergolong tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara tingkat pengangguran terbuka Sulawesi Utara masih mencapai 5,57% yaitu sebanyak 68.000 orang yang menganggur, dengan mengambil tenaga kerja lokal seharusnya telah menutupi tingkat pengangguran di Sulawesi Utara.

Mengatasi masalah seperti ini tentunya peran pemerintah untuk melakukan berbagai cara seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas pendidikan

dan keterampilan. Dengan meningkatkan poin-poin tersebut secara beringingan masalah yang dialami oleh ketenagakerjaan tersebut pun dapat teratasi. Dalam hal ini pemerintah khususnya Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sulawesi Utara harus mampu mengkoordinasikan sebagai unit dalam pemerintahan agar dapat mendayagunakan fungsi mereka dengan baik dan memberikan kontribusi yang nyata pada proses penyerapan tenaga kerja di Kawasan Ekonomi Khusus.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Komunikasi

Keseharian semua orang tentu membutuhkan akan yang namanya komunikasi, baik dari berbicara secara langsung, melalui telepon, menulis surat, bahasa isyarat, ataupun contoh komunikasi dalam bentuk lainnya. Komunikasi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu *communicatio* yang berarti "pemberitahuan atau pertukaran". Kata

sifat *communis*, yang bermakna umum atau bersama. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi baik itu pesan, ide, maupun gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Umumnya komunikasi dilakukan secara lisan maupun verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak.

Unsur-Unsur Komunikasi

Berbagai pandangan ahli tentang jumlah unsur atau elemen yang dapat mendukung terjadinya proses komunikasi. Aristoteles yang dikutip oleh Hafied Cangara (dalam Arifuddin Tike) menyatakan bahwa terjadinya proses komunikasi didukung oleh tiga unsur utama yaitu: siapa yang bicara, apa yang dibicarakan, dan siapa yang mendengar. Pandangan Aristoteles tersebut dapat dipahami bahwa: Aristoteles sebagai seorang ahli Filsafat Yunani yang pada saat itu pidato adalah menjadi primadona dalam komunikasi public atau retorika yang sangat populer pada masyarakat Yunani, maka yang

lebih penting untuk dilihat dalam komunikasi tersebut adalah ketiga hal tersebut.

Fungsi Komunikasi

Menurut Effendi Gazali dalam Ngalimun (2017:32) ada empat fungsi utama komunikasi, yaitu: *To Inform* (menginformasikan). Yakni memberikan informasi kepada orang lain tentang suatu peristiwa, masalah, pendapat, pikiran, segala tingkah laku orang lain dan apa yang disampaikan orang lain. *To Educate* (mendidik). Yakni sebagai sarana pendidikan. Karena melalui komunikasi, manusia dalam suatu lingkungan masyarakat dapat menyampaikan segala bentuk pengetahuan, ide, gagasan kepada orang lain sehingga orang lain dapat menerima segala bentuk informasi yang kita berikan. *To Entertain* (menghibur).

Komunikasi Pemerintahan

Komunikasi Pemerintahan adalah penyampaian ide, program dan gagasan

Pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan Negara. Dalam hal ini Pemerintah dapat di asumsikan sebagai komunikator dan masyarakat sebagai komunikan, namun dalam suasana tertentu bisa sebaliknya masyarakat berada pada posisi sebagai penyampai ide atau gagasan dan Pemerintah berada pada posisi mencermati apa yang diinginkan masyarakat. Dalam kondisi yang demikian pemerintah memiliki kewenangan sekaligus bertanggung jawab untuk mempertimbangkan, bahkan merespon keinginan-keinginan tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Strategi Komunikasi Pemerintahan

Menurut Harold D. Lasswell (1948) setiap kegiatan komunikasi harus berdasarkan rencana atau strategi komunikasi yang terdiri dari elemen-elemen dasar yaitu; Menentukan tujuan komunikasi, Menentukan target komunikasi, Menentukan pesan yang

akan disampaikan, Menentukan waktu yang tepat berdasarkan tahapan pembuatan keputusan dalam rangka mencapai efek yang maksimum, Menentukan metode dan media yang akan digunakan, Menentukan saluran komunikasi yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan kepada target sasaran.

Pemerintah

Pemerintah ialah sekelompok atau perkumpulan orang atau bisa juga organisasi yang diberi kekuasaan secara penuh guna memerintah dan mempunyai kewenangan untuk membuat serta menerapkan hukum atau undang-undang di suatu wilayah atau negara tertentu. Dimana itu artinya pemerintah adalah suatu badan atau lembaga publik yang mempunyai tugas dalam mewujudkan tujuan negara dimana sesuai dengan kewenangan dalam pelaksanaan kepemimpinan, pembangunan masyarakat serta koordinasi pemerintah dari segala

lembaga yang ditempati. Sedangkan dalam arti yang lebih luas, definisi pemerintah ialah semua aparatur negara yakni meliputi badan Eksekutif, Legislatif, serta Yudikatif yang memiliki tugas untuk mengatur serta melaksanakan sistem pemerintahan. Atau jika dipersempit pengertiannya, pemerintah bisa diartikan sebagai badan eksekutif saja.

Peran

Istilah "Peran" dalam "Kamus Besar Bahasa Indonesia" mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Menurut Abu Ahmadi (1982) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

(Disnakertrans)

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai suatu lembaga pemerintahan yang melakukan pelayanan terhadap tenaga kerja dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja yang siap pakai sebagai hasil kerja sama dengan lembaga-lembaga latihan yang ada (Sendjun Manulang, 1990: 31).

Kawasan Ekonomi Khusus

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah kawasan dengan batas tertentu yang tercakup dalam daerah atau wilayah untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.

Teori Kredibilitas Sumber

Teori Kredibilitas Sumber (Source Credibility Theory). Kredibilitas Sumber adalah sebuah teori dalam konteks komunikasi antar persona yang menyatakan bahwa orang lebih mungkin dipersuasi ketika sumber komunikasi menunjukkan dirinya sebagai orang yang kredibel.

Teori kredibilitas sumber (The source credibility approach) merupakan teori yang digunakan dalam penelitian ini, teori ini adalah salah satu pendekatan yang digunakan dalam komunikasi persuasif, dengan asumsi dasarnya bahwa; "kredibilitas sumber atau komunikator yang mempunyai kredibilitas tinggi sangat berpengaruh pada sikap/perilaku orang lain" (infante, 1990:174) Tan menambahkan bahwa "sumber yang kredibel lebih efektif dalam persuasi dari pada sumber yang tidak kredibel". Selaku pelaku utama dalam proses komunikasi, sumber memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam

mengendalikan jalannya komunikasi. (Tan, 1981:112).

Melakukan komunikasi persuasi yang efektif terdapat 2 (dua) komponen kredibilitas sumber, yakni *keahlian* (*expertise*) yang merupakan kesan yang dibentuk penerima tentang kemampuan sumber komunikasi persuasi berkaitan dengan topik yang dibicarakan, *dapat dipercaya* (*trustworthiness*) yang merupakan kesan penerima tentang sumber komunikasi yang berkaitan dengan wataknya seperti kejujuran, ketulusan, bersikap adil, bersikap sopan, serta berperilaku etis. Faktor keahlian adalah tingkat penguasaan sumber yang dipersepsi khalayak mengetahui jawaban yang benar dan tepat pada pokok permasalahan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif, Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung

menggunakan analisis.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah garis besar dari penelitian, agar observasi serta penelitian tersebut lebih terarah. Berdasarkan masalah penelitian maka yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Keahlian Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebagai sumber informasi (komunikator) dalam mempersuasi para tenaga kerja lokal dalam rangka meningkatkan keterampilan.
2. Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebagai sumber informasi (komunikator) merupakan sumber yang dipercaya dalam menyampaikan informasi tentang penyerapan tenaga kerja.

Sumber Data dan Informan



Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.

Informan penelitian adalah subyek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Peneliti mengambil informan 5 pegawai yang ada di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Utara. Sampling atau biasa disebut dengan teknik sampling merupakan teknik atau cara yang digunakan peneliti untuk mengambil sampel penelitian yang akan diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Dalam melakukan wawancara, pewawancara harus dapat menciptakan suasana santai tetapi serius artinya bahwa wawancara dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, tidak main-main, tetapi tidak kaku. Suasana ini penting dijaga, agar responden mau menjawab apa saja yang dikehendaki oleh pewawancara secara jujur. (Arikunto, 1983).

3.5.2 Observasi

Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi atau bahan keterangan yang jelas tentang masalah yang berhubungan dengan Peran Komunikasi Pemerintah Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dalam Penyerapan Tenaga Kerja Lokal di Kawasan Ekonomi Khusus Likupang.

3.5.3 Dokumentasi



Dokumentasi adalah mencari data mengenai variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. (Arikunto, 1983). Menurut Sugiyono (2013), dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Dalam penelitian ini, akan digunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992) yaitu:

3.6.1 Reduksi Data

Data diperoleh di lokasi penelitian (data lapangan) akan dituangkan dalam uraian atau laporan lapangan tersebut oleh peneliti akan direduksi, dirangkum dan dipilih hal-hal pokok, difokuskan

pada hal-hal yang penting. Reduksi data akan berlangsung terus-menerus selama berlangsungnya penelitian.

3.6.2 Penyajian Data

Alur yang paling penting selanjutnya dari analisis data adalah penyajian data. Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya display (penyajian data). Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

3.6.3 Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisa data adalah kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) provinsi Sulawesi Utara adalah dinas yang memiliki kewenangan dibidang pembinaan dan penempatan tenaga kerja juga perlindungan tenaga kerja pada wilayah provinsi Sulawesi Utara.

Tugas utama Disnakertrans adalah sebagai instansi pemerintah bidang tenaga kerja dan transmigrasi pada daerah wilayah kerjanya. Untuk fungsi dari Disnakertrans diantaranya merumuskan kebijakan ketenagakerjaan dan transmigrasi, pelaksana kebijakan tenaga kerja dan transmigrasi, administrasi ketenagakerjaan, pengawasan tenaga kerja dan transmigrasi, pelaporan dan evaluasi bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

Pembahasan Hasil Penelitian

Penyebab pemerintah lebih banyak mengadopsi tenaga kerja dari luar adalah karena rendahnya kualitas tenaga kerja dari masyarakat lokal itu sendiri. Berdasarkan latar belakang dari masyarakat di desa Likupang, sebagian besar masih sangat kurang dalam hal keterampilan, baik soft skill maupun hard skill. Namun selain itu, penyebab pemerintah lebih banyak mengadopsi tenaga kerja dari luar adalah karena sebagian besar investor yang datang berbisnis di Kawasan Ekonomi Khusus ini datangnya juga dari luar. Maka otomatis perusahaan banyak mengambil tenaga kerja dari luar. Data yang didapat melalui wawancara kepada 5 (lima) orang informan yang memiliki jabatan di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara melalui pertanyaan-pertanyaan terkait dengan teori kredibilitas sumber yaitu menyangkut keahlian/ kemampuan pemerintah dalam memberikan informasi dan sebagai sumber yang

dipercaya dalam menyampaikan informasi lewat pembekalan-pembekalan di pelatihan-pelatihan menggambarkan bagaimana peran mereka dalam penyerapan tenaga kerja lokal di Likupang sudah optimal.

Pemerintah juga tidak dapat membatasi kuantitas tenaga kerja dari luar sesuai dengan yang ditulis UU No.13 thn 2003 tentang undang-undang ketenagakerjaan. Dan juga dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa "setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan tersebut dipertegas dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga kerja yang berbunyi : "Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Sedangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

menyebutkan bahwa "Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan". Maka dari itu dengan membatasi tenaga kerja dari luar yang masuk di daerah Sulawesi Utara tentunya melanggar undang-undang dan juga berdampak pada para tenaga kerja dari lokal yang akan mencari kerja di luar Sulawesi Utara sendiri.

Tetapi bukan berarti pemerintah tidak melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal. Telah banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara. Seperti contohnya, berbagai macam sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sulawesi Utara dengan bekerja sama dengan beberapa Universitas dan menjadi narasumber untuk membagikan informasi dan perkembangan terkait Kawasan Ekonomi Khusus Likupang.

Banyak contoh terkait rendahnya kualitas dari tenaga kerja lokal yang merugikan perusahaan. Misalnya, satu restoran luar yang masuk di Sulawesi Utara, dikarenakan ketidakdisiplinan dan kecerobohan salah satu tenaga kerja ini, yang akhirnya membawa nama restoran ini jadi tidak baik. Dan menjadi permainan bisnis, dan akhirnya PHK. Mulai saat itu restoran tersebut hanya mengambil tenaga kerja dari luar dan berhenti menerima tenaga kerja lokal.

Oleh karena itu dalam upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal, khususnya mengenai soft skill dan hard skill pemerintah telah menyediakan berbagai macam pelatihan seperti Delta Bitung yang didalamnya diajarkan untuk menambah keterampilan sesuai yang diminati tenaga kerja lokal itu sendiri. Sehingga nantinya ketika akan melamar pekerjaan pada suatu perusahaan mereka telah dibekali dan mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar.

Teori yang digunakan peneliti

adalah teori kredibilitas sumber seperti yang telah dikemukakan oleh Hovland Teori Kredibilitas Sumber adalah sebuah teori dalam konteks komunikasi antar persona yang menyatakan bahwa orang lebih mungkin dipersuasi ketika sumber komunikasi menunjukkan dirinya sebagai orang yang kredibel. Seseorang biasanya akan lebih percaya dan cenderung menerima dengan baik pesan-pesan yang disampaikan oleh orang yang memiliki kredibilitas di bidangnya. Berkaitan dengan penelitian ini, pemerintah merupakan tokoh tersebut. Peran pemerintah sangatlah penting dalam penyerapan tenaga kerja lokal di desa Likupang. Karena pemerintah adalah tokoh yang memiliki kredibilitas yang tinggi sehingga dapat mempersuasi tenaga kerja lokal untuk meningkatkan kualitas diri agar memiliki kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Dengan begitu akan menaikkan tingkat tenaga kerja lokal di Kawasan Ekonomi Khusus Likupang dan menurunkan

angka pengangguran yang ada di Sulawesi Utara.

Kesimpulan

1. Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebagai sumber informasi memiliki keahlian dalam mempersuasi para tenaga kerja lokal. Hal ini di dukung dengan tidak adanya kesulitan dalam berkomunikasi dan mampu mempengaruhi audience dalam setiap kegiatan komunikasinya terkait dengan ketenagakerjaan.

2. Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebagai sumber informasi (komunikator) merupakan sumber yang dipercaya dalam memberikan informasi menyangkut masalah ketenagakerjaan. Hal ini didukung dengan penguasaan akan peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan ketenagakerjaan.

3. Pemerintah Provinsi dalam hal ini

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebagai sumber informasi sangat berperan dalam memfasilitasi penyerapan tenaga kerja khususnya tenaga kerja lokal di kawasan ekonomi khusus dengan memberikan informasi-informasi baik menggunakan media massa, media komunikasi antar pribadi, maupun media sosial serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan pelatihan baik yang telah menjadi program kantor maupun yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, serta lembaga-lembaga pendidikan yang terkait dengan masalah ketenagakerjaan.

Saran

1. Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebagai sumber informasi (komunikator) yang memegang peran penting dalam penyerapan tenaga kerja harus selalu berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan maupun investor yang melakukan kegiatan di kawasan

ekonomi khusus likupang dalam sektor pariwisata.

3. Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebagai sumber informasi (komunikator) harus tetap konsisten dalam membekali tenaga kerja melalui program pelatihan dengan materi-materi, keterampilan-keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan agar siap pakai dan berdaya saing.

Daftar Pustaka

- Abu, Ahmadi. 1982. *Psikologi Sosial*. Bina Ilmu Soerjono, Surabaya.
- Afrizal, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Alexis.S .Tan. 1981. *Pengantar Teori & Manajemen Komunikasi*. Jurnal Press, Jakarta.
- Arifin, Anwar, 2008. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar Ringkas*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arikunto, S, 1983. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Berlo, K. David, 1996. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Rosdakarya, Bandung.
- Cangara, Hafied, 2008. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Claude Shannon, W. Weaver, 1949. *The Mathematical Theory of Communication*. Beverly Hills.
- Hasan, Erliana, 2010. *Komunikasi Pemerintahan*, Refika Aditama, Bandung.
- Hovland, CarlL. 2007. *Definisi Komunikasi*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Infante, Dominick A., Andrew S. Rancer, Deanna F. Womack, 1990. *Building Communication Theory*. Waveland Press, Inc. Illinois.

- Kriyantono, Rachmat, 2009. ***Teknik Praktis Riset Komunikasi***. Perdana Media Group, Jakarta.
- Lasswell, H, 1948. ***The Structure Function of Communication in Society***. Institute for Religious and Social Studies, New York.
- Mankiw N, Gregory, 2009. ***Macroeconomics***, 7th Edition. Worth Publishers, New York.
- Manulang, Sendjun H. 1990. ***Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia***. Rineka Cipta, Jakarta.
- Miles, M. B. & Huberman, M, 1992. ***Analisis Data Kualitatif***. Penerbit Universitas Indonesia.
- Ngalimun, 2017. ***Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis***. PT. Pustaka Baru Pers, Yogyakarta.
- Pranadjaja, Muhamad Rohidin, 2003. ***Hubungan Antar Lembaga Pemerintahan***. Sinar Grafika, Jakarta.
- Santoso, Edi, 2010. ***Teori Komunikasi***. PT. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Simanjuntak, Payaman, J. 2000. ***Sistem Pemerintah dan Negara***. Himpunan Pembina Sumberdaya Manusia Indonesia, Jakarta.
- Simon, Herbert A, Donald W. Smithburg, and Victor A. Thomson, The Communication Process, dalam Richard J. Stilman II. 1992. ***Public Administration: Concepts and Cases***. Houghton Mifflin Company, Boston.
- Soekanto, Soerjono, 2002, ***Teori Peranan***. Bumi Aksara, Jakarta
- Sugiyono, 2013. ***Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D***. CV. Alfabeta, Bandung.
- Syafiie, Inu Kencana, 2005. ***Pengantar Ilmu Pemerintahan***. Refika Aditama, Bandung.
- Sumber lain :**
<https://kek.go.id/>
<https://www.kompasiana.com/maniksu-koco/5892f62895937356294ef48a/apa->

[yang-dimaksud-dengan-kawasan-ekonomi-khusus](#)

<https://insanpelajar.com/keuntungan-dan-kerugian-kawasan-ekonomi-khusus/>